










**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DALAM  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**



## I. Mengenal SDGs

SDGs dibangun berdasarkan lintasan historis yang telah dirintis oleh negara-negara dan PBB, termasuk The Economic and Social Council (ECOSOC) yang merupakan salah satu organisasi bagian dari PBB. Agenda SDGs berisi 17 Tujuan/ *Goals* yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Pada setiap Goal terdapat 1 (satu) atau lebih target (total terdapat 169 target), dan pada setiap target, terdapat 1 (satu) atau lebih indikator (per April 2022 terdapat total 248 indikator). 17 SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

	<b>Tujuan 1</b> - Tanpa kemiskinan ( <i>No poverty</i> ) Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
	<b>Tujuan 2</b> - Tanpa kelaparan ( <i>Zero hunger</i> ) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
	<b>Tujuan 3</b> - Kehidupan sehat dan sejahtera ( <i>Good health and well-being</i> ) memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
	<b>Tujuan 4</b> - Pendidikan berkualitas ( <i>Quality education</i> ) Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
	<b>Tujuan 5</b> - Kesetaraan gender ( <i>Gender equality</i> ) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
	<b>Tujuan 6</b> - Air bersih dan sanitasi layak ( <i>Clean water and sanitation</i> ) Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
	<b>Tujuan 7</b> - Energi bersih dan terjangkau ( <i>Affordable and clean energy</i> ) Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

	<p><b>Tujuan 8</b> - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (<i>Decent work and economic growth</i>)</p> <p>Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak.</p>
	<p><b>Tujuan 9</b> - Industri, inovasi, dan infrastruktur (<i>Industry, innovation, and infrastructure</i>)</p> <p>Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.</p>
	<p><b>Tujuan 10</b> - Berkurangnya kesenjangan (<i>Reduced inequalities</i>)</p> <p>Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.</p>
	<p><b>Tujuan 11</b> - Kota dan komunitas berkelanjutan (<i>Sustainable cities and communities</i>)</p> <p>Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.</p>
	<p><b>Tujuan 13</b> - Penanganan perubahan iklim (<i>Climate action</i>)</p> <p>Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.</p>
	<p><b>Tujuan 12</b> - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (<i>Responsible consumption and production</i>)</p> <p>Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.</p>
	<p><b>Tujuan 14</b> - Ekosistem laut (<i>Life below water</i>)</p> <p>Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.</p>
	<p><b>Tujuan 15</b> - Ekosistem daratan (<i>Life on land</i>)</p> <p>Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.</p>
	<p><b>Tujuan 16</b> - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (<i>Peace, justice, and strong institutions</i>)</p> <p>Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.</p>
	<p><b>Tujuan 17</b> - Kemitraan untuk mencapai tujuan (<i>Partnerships for the goals</i>)</p> <p>Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.</p>

## II. SDGs di Indonesia

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan agenda SDGs, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut sekaligus merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak, baik pemerintah tingkat nasional maupun daerah, serta kelompok-kelompok masyarakat, antara lain akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil dan media.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa amanat dalam Perpres tersebut, antara lain: (1) Peta Jalan (*Roadmap*) Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan strategis tahapan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional hingga 2030 sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; (2) melalui Peraturan Menteri PPN/ kepala Bappenas Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2017-2029; dan (3) hingga tahun 2021 telah terbit 29 Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

## III. Peran Dan Kontribusi BPK Dalam Pencapaian SDGs

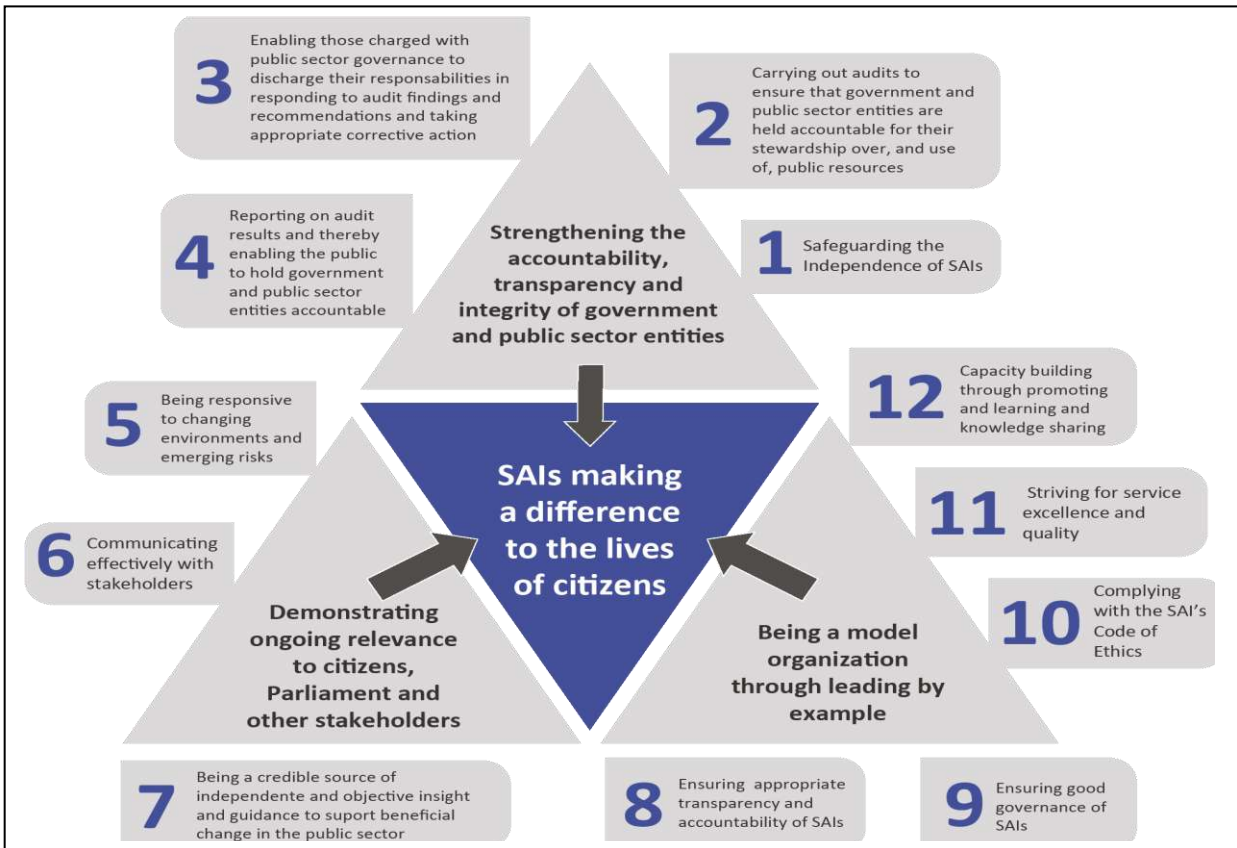
Dalam deklarasi negara anggota PBB tentang SDGs yang dituangkan dalam dokumen “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*,” dikatakan bahwa “Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan tindak lanjut (*follow-up*) dan tinjauan (*review*), baik di tingkat nasional, regional, maupun global, terhadap kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran selama lima belas tahun mendatang”.

Menyadari pentingnya Agenda 2030, Organisasi Internasional Lembaga Pemeriksa Keuangan - *The International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) pada INCOSAI XXII (*International Congress of Supreme Audit Institution*), di Abu Dhabi tahun 2016 sepakat untuk mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI juga memasukkan SDGs sebagai *Crosscutting Priority 2* dalam Rencana Strategis (Renstra) INTOSAI 2017-2022, yaitu “*Contributing to the follow-up and review of the Sustainable Development Goals within the context*

*of each nation's specific sustainable development efforts and Sustainable Development Goals individual mandates.* Dalam *Crosscutting Priority 2* tersebut, disebutkan bahwa Renstra INTOSAI berfungsi sebagai peta jalan bagi INTOSAI dan SAI anggotanya untuk mendukung dan membantu implementasi SDGs dalam 4 kategori/pendekatan dimana SAI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi implementasi SDGs secara nasional, regional, dan global, dan mendorong implementasi pada isu-isu seperti peningkatan akuntansi dan audit pemerintah yang konsisten dengan mandat SAI, yaitu: (1) *Assessing the preparedness of national governments to implement, monitor, and report on progress of the SDGs, and subsequently to audit their operation and the reliability of the data they produce;* (2) *Undertaking performance audits that examine the economy, efficiency, and effectiveness of key government programs that contribute to specific aspects of the SDGs;*(3) *Assessing and supporting, as appropriate, the implementation of SDG 16 which relates in part to transparent, efficient, and accountable institutions;and SDG 17, which concerns partnerships and means for implementation;* dan (4) *Being models of transparency and accountability in their own operations, including auditing and reporting.*

SDGs, yang menetapkan berbagai tujuan terkait ekonomi, sosial dan lingkungan, serta aspek keadilan dan inklusif, sejalan dengan INTOSAI P-12 yang memuat *principles of the value and benefits of SAIs* di bawah tiga tujuan di mana Supreme Audit Institution (SAI) dapat memiliki peran penting “*in making a difference to the lives of citizens*” melalui hasil pemeriksaannya. Pemeriksaan BPK diharapkan memberikan Benefit bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan ditindaklanjutinya rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Pemerintah. Sementara, pelaksanaan proses bisnis sehari-hari di BPK, merupakan *Value* yang dimiliki oleh setiap pegawai BPK dalam menjalankan tugasnya.

Gambar 1. INTOSAI P-12 (12 prinsip nilai dan manfaat SAI di bawah 3 tujuan)



BPK menuangkan rencana dan strategi pemeriksaan ke dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020–2024. Dalam merumuskan Renstra, BPK memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan nasional, merancang strategi pemeriksaan yang mampu mengawal SDGs, dan perkembangan internasional terkait tata kelola keuangan negara dan praktik terbaik pengelolaan kinerja lembaga pemeriksa.

Pemeriksaan implementasi SDGs merupakan pemeriksaan atas program pencapaian SDGs. RPJMN 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional disebutkan telah mengarusutamakan SDGs sehingga target dari 17 SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan/prioritas nasional Indonesia. Untuk itu, setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK adalah bagian tidak terpisahkan sebagai upaya dan peran BPK dalam mendorong dan berkontribusi pada pencapaian SDGs.

Pemeriksaan implementasi SDGs tidak terlepas dari prinsip-prinsip SDGs, diantaranya adalah integrasi, inklusif, dan *leave no one behind*. Prinsip integrasi dalam SDGs menekankan bahwa

pencapaian suatu target/tujuan SDGs berkaitan dan ada kalanya kontradiktif dengan upaya dan pencapaian target/tujuan SDGs yang lain yang saling terkoneksi dan lintas sektoral. Untuk melaksanakan SDGs, Indonesia menjalankan prinsip partisipasi yang inklusif dengan melibatkan 4 *platform* partisipasi yang terdiri atas: (1) Pemerintah dan Parlemen; (2) Akademisi dan Pakar; (3) Filantropi dan Pelaku Usaha; serta (4) Organisasi Masyarakat Sipil dan Media. Setiap *platform* memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan. SDGs tidak hanya mencakup tujuan dan target, namun juga cara pelaksanaannya yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait kebijakan, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Prinsip *Leave no one behind* menekankan pentingnya tidak meninggalkan siapapun dan terlebih dahulu mencapai yang paling jauh tertinggal terutama kelompok rentan serta mengakui perlunya mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Dengan *memperhatikan* prinsip-prinsip pelaksanaan SDGs maka perlu strategi pemeriksaan yang dapat menilai implementasi SDGs, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsipnya. Sesuai dengan renstra BPK 2020-2024, BPK menerapkan model pemeriksaan dari IDI's SDGs Audit Model (ISAM) yang memperhatikan prinsip pelaksanaan SDGs dalam mendesain pemeriksaan implementasi SDGs melalui konsep utama antara lain:

a. Pendekatan *whole of government* dengan fokus pada *outcomes*

Prinsip integrasi dalam SDGs menekankan bahwa pencapaian target/tujuan berkaitan dan adakalanya kontradiktif dengan upaya dan pencapaian dari target/tujuan yang lain sehingga diperlukan koherensi atas hal-hal yang terkait dalam pencapaian target tersebut. Pencapaian target tersebut, baik target nasional maupun daerah, membutuhkan pendekatan *whole of government*. Pendekatan ini memperkenalkan pergeseran fokus kinerja pemerintah dari 'implementasi satu program/lembaga' ke arah 'hasil yang ingin dicapai pemerintah' untuk mengatasi permasalahan atau tantangan publik. Untuk itu, pemeriksaan implementasi SDGs perlu berfokus pada pencapaian *outcomes* dan menggunakan pendekatan *whole of government* antara lain dengan menyimpulkan/ menilai koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakannya, baik secara interkoneksi target/tujuan maupun secara pendekatan, di semua tingkatan pemerintah.

b. *Leave no one behind*

Pemeriksaan implementasi SDGs perlu memasukkan tujuan dan pertanyaan (langkah/prosedur) pemeriksaan yang dapat membantu menyimpulkan prinsip *leave no one behind*. Perencanaan pemeriksaan perlu mempertimbangkan prinsip *leave no one behind* dalam memilih topik pemeriksaan dan/atau memeriksa prinsip tersebut sebagai isu lintas sektoral dalam pemeriksaan. Pemeriksaan juga perlu menentukan sampel pemeriksaan yang relevan dengan target dan/atau indikator SDGs, yaitu dengan sampel pemeriksaan yang menjangkau pihak-pihak yang tertinggal, baik karena diskriminasi, geografi, tata kelola pemerintahan, status sosial ekonomi, maupun faktor guncangan dan kerentanan lainnya. Dengan langkah/prosedur tersebut, maka BPK dapat memberikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat mendorong adanya pengalihan sumber daya program-program SDGs ke pihak yang paling membutuhkan (dhi. pihak yang tertinggal).

c. *Multi-stakeholder engagement*

SDGs melalui Agenda 2030 mengedepankan proses implementasi dan tindak lanjut yang bersifat partisipatif dan inklusif. Kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan menjadi inti dari Agenda 2030 dan *stakeholder* diakui sebagai mitra penting dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan dan meningkatkan kesadaran publik. Untuk itu, pemeriksaan implementasi SDGs perlu memasukkan tujuan dan pertanyaan (langkah/prosedur) yang dapat membantu menyimpulkan keterlibatan berbagai *stakeholder* (pemerintah maupun non-pemerintah). Sejak perencanaan pemeriksaan, perlu dibuat analisis keterlibatan *stakeholders* dalam suatu topik/tema/fokus pemeriksaan yang terhubung pada indikator/target/tujuan SDGs. Dengan melakukan penilaian atas ‘keterlibatan berbagai *stakeholder*’ maka pemeriksaan diharapkan dapat melihat upaya pemerintah dalam menjangkau dan melibatkan berbagai *stakeholder* dalam implementasi SDGs.

Berdasarkan konsep utama pemeriksaan implementasi SDGs dan kategori pemeriksaan yang ada di BPK, maka BPK mengkategorikan pemeriksaan SDGs melalui 2 (dua) pendekatan yaitu melalui pemeriksaan yang bersifat mandiri (*Dedicated SDGs Audit*) dan pemeriksaan yang bersifat melekat dengan pemeriksaan lain (*Embedded SDGs Audit*) atau pemeriksaan berperspektif SDGs.

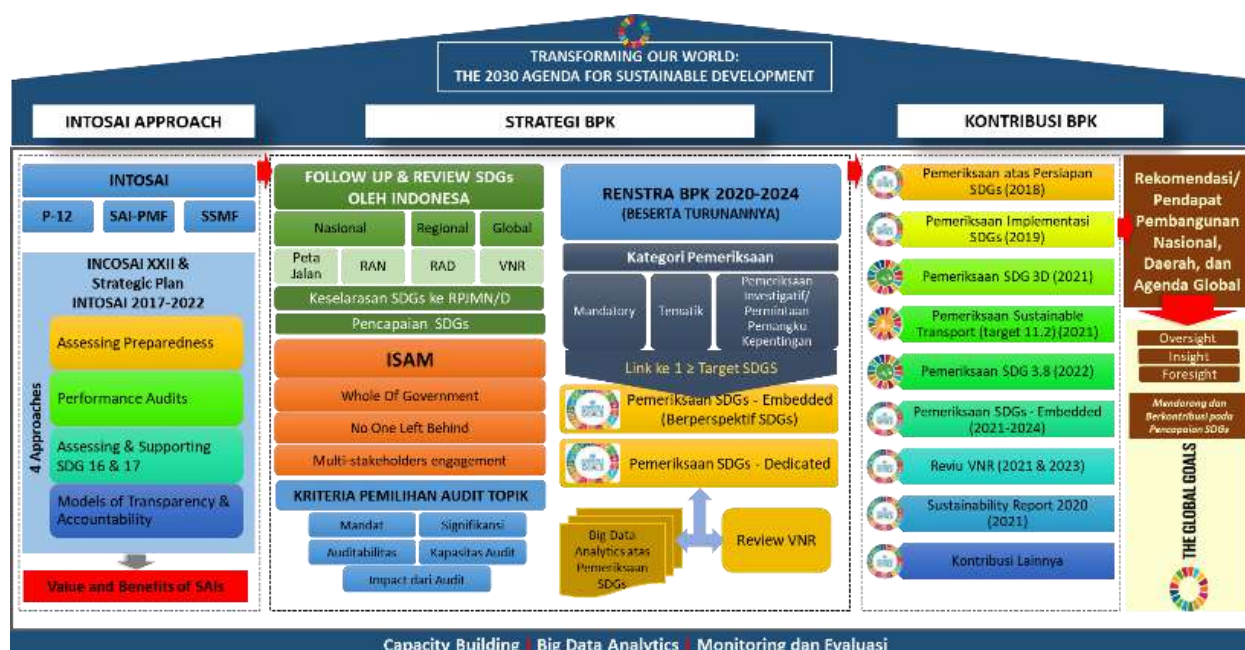
Pemeriksaan SDGs yang bersifat *dedicated* adalah pemeriksaan kinerja terhadap implementasi kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian target nasional atau lokal/daerah yang memiliki



kaitan dengan satu target SDG atau lebih. Pemeriksaan berperspektif SDGs adalah pemeriksaan SDGs yang melekat dengan pemeriksaan lainnya dan mengakomodasi langkah-langkah pemeriksaan yang diperlukan dan/atau metodologi pemeriksaan dalam pemeriksaan SDGs

Secara garis besar, kerangka strategi dan kontribusi BPK dalam pencapaian SDGs dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. Kerangka strategi dan kontribusi BPK dalam pencapaian SDGs



Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut atas beberapa peran dan kontribusi yang telah BPK lakukan dalam pencapaian SDGs di Indonesia:

**a. Pemeriksaan Preparedness SDGs dan Implementation SDGs**

Pada semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development Goals* pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Demikian pula, pemeriksaan kinerja BPK pada semester 1 tahun 2019, atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator

SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, yaitu SDGs Tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17.

#### b. Pemeriksaan SDGs (Dedicated)

Pada semester 1 tahun 2021 BPK telah melakukan 2 pemeriksaan pendahuluan atas pemeriksaan SDGs yang bersifat *dedicated* yang dilanjutkan dengan pemeriksaan terincinya pada semester 2 tahun 2021. Pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan Kinerja SDG 3D (Menguatkan kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global).
- Pemeriksaan Kinerja SDG 11.2 atas Program Pendukung Transportasi Perkotaan Berkelanjutan (*Sustainable Transport*).

Pada tahun 2022-2024 BPK merencanakan untuk tetap melakukan pengawalan implementasi SDGs di Indonesia melalui pemeriksaan SDGs (*dedicated*) pada target-target tertentu, antara lain: target 3.8 tentang kesehatan universal, target 2.1 tentang kecukupan pangan, target 16.6 tentang peningkatan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan, serta target 5 tentang kesetaraan gender.

#### c. Review atas Voluntary National Review (VNR) 2021 2021

Di tingkat global, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs, dengan menyampaikan VNR setiap 2 tahun di HLPF. Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia telah tiga kali mempresentasikan VNR, yaitu pada tahun 2017, 2019, dan 2021, dan direncanakan untuk kembali mempresentasikan VNR di tahun 2023.

Gambar 3. VNR SDGs Indonesia tahun 2017, 2019, dan 2021 serta Review VNR 2021 oleh BPK



*Review* atas VNR SDGs Indonesia Tahun 2021, adalah sebagai respon BPK atas permintaan dari Tim Koordinasi Nasional SDGs Indonesia. Koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan BPK menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan laporan VNR yang akurat dan berbasis bukti. BPK melakukan review VNR dan kemudian menerbitkan laporan *review*, di mana BPK menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan. Peran BPK sangat penting untuk mengawal agar Agenda 2030 berada di jalur yang benar dan memastikan bahwa pembuat kebijakan yang terlibat di dalamnya lebih transparan, akuntabel, dan inklusif dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan.

Gambar 4. Penyampaian Hasil Review VNR 2021 Kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/ Bappenas



Sesuai dengan Prinsip 12 INTOSAI, BPK mengharapkan *review* VNR Indonesia 2021 menjadi langkah awal kerja sama konstruktif lebih lanjut antara pemerintah dan lembaga audit untuk memperkuat VNR dan sebagai praktik yang baik yang dapat dijadikan pelajaran bagi negara lain dan lembaga audit. Badan Pemeriksa Keuangan dan pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama konstruktif di masa mendatang guna memperkuat tindak lanjut proses review implementasi Agenda 2030 di Indonesia.

Gambar 5. Presentasi Gabungan antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Wakil Ketua BPK pada HLPF 2021 di Markas Besar PBB, New York



Harapan BPK adalah agar pembaca memahami bahwa setiap rakyat Indonesia adalah salah satu dari pemangku kepentingan yang memiliki tugas dan kontribusi masing masing dalam pencapaian SDGs. Tujuh belas tujuan SDGs dapat membawa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan bersama, hanya jika seluruh pihak dapat berperan aktif sesuai dengan yang diharapkan.

**d. Sentra Koordinasi SDGs**

Sejak SDGs disepakati pada tahun 2015, bentuk kontribusi BPK dalam pencapaian agenda global SDGs tidak hanya terkait dengan pemeriksaan saja, namun juga dalam bentuk lainnya, yaitu antara lain melalui penyelenggaraan seminar terkait SDGs, review atas VNR, dan partisipasi BPK dalam kegiatan internasional baik sebagai pembicara maupun bentuk partisipasi lainnya seperti pada SAI Leadership and stakeholder Meeting, HLPF, Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD), South-East Asia (SEA) Forum on Implementation of The SDGs, SEA Multi-Stakeholder Forum, dan forum-forum internasional lainnya.

Bentuk kegiatan kontribusi BPK dalam pencapaian SDGs tersebut perlu terorganisasi dengan lebih baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasinya. Untuk mengoptimalkan pemeriksaan SDGs baik secara *dedicated*, *embedded*, maupun pelaksanaan review atas VNR agar lebih efektif, efisien, bersinergi, dan lebih memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat, diperlukan suatu tim lintas sektor atau sentra koordinasi SDGs yang dapat mengawal strategi pemeriksaan SDGs di BPK. Sentra koordinasi SDGs sangat diperlukan karena SDGs bersifat lintas sektor dan koordinasi antar sektor harus berjalan dengan baik agar BPK dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian SDGs.

Secara umum, hasil yang diharapkan dari pembentukan sentra koordinasi SDGs adalah kontribusi BPK dalam mengawal pencapaian SDGs oleh pemerintah Indonesia sejalan dengan Rencana Strategis INTOSAI 2017-2022 pada *Crosscutting Priority 2* yaitu “*Contributing to the follow-up and review of the Sustainable Development Goals within the context of each nation’s specific sustainable development efforts and Sustainable Development Goals individual mandates*”, secara khusus Sentra Koordinasi SDGs mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan dengan satuan kerja terkait yang berkaitan dengan peran BPK dalam mengawal pencapaian SDGs, berupa:

- 1) Program *Capacity Building* meliputi pengembangan kapasitas institusi/sistem organisasi (perencanaan, strategi, proses bisnis, sistem dan prosedur, konsultasi, kepemimpinan, tata kelola, dan lain-lain) dan kapasitas SDM, terkait dengan peran BPK dalam mengawal pencapaian SDGs baik secara nasional maupun internasional;
- 2) Program Penyusunan Kajian meliputi penyusunan publikasi dan pedoman yang berguna untuk penyempurnaan pemeriksaan SDGs di BPK dan dapat menyumbangkan pemikiran kepada dunia internasional mengenai bagaimana pemeriksaan SDGs sebaiknya dilaksanakan;
- 3) Program Advokasi yaitu program yang bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan strategis, baik secara internal (bagi para pimpinan/manajemen unit kerja pemeriksaan) dan eksternal (nasional dan internasional) mengenai Agenda 2030 dan SDGs serta pemeriksaan SDGs.

